

Nama : Aulya Syifa Zulkarnaen

NPM : 2313031009

Kelas : A

UJIAN AKHIR SEMESTER EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Jawaban:

1. Menurut saya, dari sisi efisiensi internal, penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten A belum sepenuhnya efektif. Pembangunan gedung sekolah baru memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, sementara aspek yang langsung memengaruhi kualitas pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran masih kurang. Dari sisi efisiensi eksternal, anggaran pendidikan juga belum memberikan hasil yang optimal. Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik dan sesuai. Namun, karena kualitas pembelajaran belum meningkat, maka manfaat pendidikan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dan pembangunan daerah juga menjadi kurang maksimal.
2. Kebijakan yang lebih berfokus pada pembangunan fisik sekolah memang dapat memperluas akses pendidikan, tetapi dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia cenderung terbatas. Siswa mungkin memiliki fasilitas belajar yang lebih baik, namun tanpa didukung guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, dan media pembelajaran yang memadai, kualitas pembelajaran tidak akan meningkat secara signifikan. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan berpotensi memiliki keterampilan dan kompetensi yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga kualitas sumber daya manusia sulit berkembang secara optimal.
3. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih seimbang. Selain pembangunan sarana dan prasarana, anggaran juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, memperbaiki kurikulum, serta menyediakan media pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan dapat diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar sehingga tujuan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Jawaban:

1. Pada kasus tersebut terjadi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap, akses internet yang memadai, serta guru yang lebih profesional. Sedangkan, sekolah di pedesaan masih mengalami kekurangan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya akses teknologi. Perbedaan kondisi ini menyebabkan

kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata, sehingga hasil belajar siswa di desa menjadi lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

2. Ketimpangan pendidikan ini dapat mempengaruhi dampak ekonomi jangka panjang yang cukup besar. Siswa yang memperoleh pendidikan berkualitas cenderung memiliki keterampilan dan produktivitas yang lebih tinggi sehingga memiliki peluang kerja dan pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan pendidikan dengan kualitas rendah akan lebih sulit bersaing di dunia kerja. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dapat semakin lebar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pemerataan pembangunan ekonomi dan memperbesar tingkat kemiskinan di daerah yang tertinggal.
3. Menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dengan memberikan perhatian lebih kepada sekolah di daerah pedesaan. Langkah yang dapat dilakukan dengan menambah dan mendistribusikan guru secara merata, meningkatkan fasilitas pendidikan, memperluas akses internet, serta menyediakan bantuan teknologi pembelajaran bagi sekolah yang masih tertinggal. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan bagi guru di daerah agar kualitas pembelajaran dapat meningkat. Dengan kebijakan tersebut, kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh siswa.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Jawaban:

1. Pendidikan merupakan investasi yang dilakukan individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Namun, pada kasus ini peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Salah satu penyebab utama pengangguran terdidik adalah terjadinya *mismatch* antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan memiliki pengetahuan akademik, tetapi belum menguasai keterampilan yang dibutuhkan industri, seperti kemampuan digital, komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah. Berdasarkan teori human capital, pengangguran terdidik pada kasus tersebut terjadi karena investasi pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan mengalami kesulitan untuk bersaing dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya.
2. Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan seharusnya dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, pada kasus ini terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang berakibat pada banyaknya lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya atau bahkan menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan kurikulum dan proses pembelajarannya dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.
3. Menurut saya, perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan magang, serta sertifikasi kompetensi. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi

dan kebutuhan pasar kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan. Selain itu, pengembangan *hard skills* dan *soft skills* seperti komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah juga perlu ditingkatkan. Sehingga, relevansi lulusan dapat meningkat serta peluang memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Jawaban:

1. Pada kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki karakteristik sebagai barang publik dan barang privat. Sebagai barang privat, mahasiswa memperoleh manfaat langsung dari pendidikan, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Sehingga, mahasiswa perlu menanggung sebagian biaya pendidikan. Namun, pendidikan juga merupakan barang publik karena memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika biaya pendidikan meningkat terlalu tinggi, akses masyarakat berpenghasilan rendah dapat berkurang sehingga tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial menjadi kurang optimal.
2. Kenaikan uang kuliah sebesar 25% dapat menimbulkan beberapa dampak sosial ekonomi. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan biaya pendidikan dapat memperberat beban ekonomi dan bahkan menyebabkan sebagian mahasiswa menunda atau menghentikan pendidikannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperbesar kesenjangan pendidikan dan pendapatan antar kelompok masyarakat. Biaya pendidikan yang tinggi tentu menjadi hambatan akses bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi tidak merata. Sehingga, mobilitas sosial masyarakat menjadi lebih rendah dan kesenjangan ekonomi dapat semakin meningkat.
3. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan tinggi memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan negara. Intervensi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi pendidikan, atau perluasan program bantuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan tepat. Dengan adanya intervensi tersebut, peningkatan kualitas fasilitas kampus tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Kemudian, kebijakan ini juga dapat membantu mewujudkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Jawaban:

1. Berdasarkan konsep biaya pendidikan, pembelajaran digital tidak hanya memerlukan biaya sekolah, tetapi juga biaya tambahan seperti pembelian perangkat elektronik dan kuota internet untuk mengikuti proses pembelajaran. Bagi keluarga kurang mampu, biaya tersebut tentu menjadi beban yang cukup besar sehingga dapat menghambat akses siswa terhadap pembelajaran. Dari sisi opportunity cost, keluarga harus mengorbankan kebutuhan yang lain untuk memenuhi biaya pembelajaran digital.
2. Kesenjangan digital menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, siswa yang memiliki perangkat dan internet memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan

baik, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu sering mengalami hambatan dalam mengakses materi dan berinteraksi dengan guru sehingga kesempatan belajarnya lebih terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan penurunan capaian belajar, memperbesar kesenjangan prestasi akademik antar siswa, serta mengurangi efektivitas proses pendidikan. Keterbatasan akses internet dan perangkat digital pada kasus ini dapat menurunkan efektivitas pembelajaran serta memperbesar kesenjangan hasil belajar antar siswa. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi tidak merata dan prestasi siswa dari kelompok ekonomi rendah cenderung tertinggal.

3. Menurut saya, pemerintah perlu menerapkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan digital. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memberikan bantuan perangkat belajar dan subsidi internet bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran digital. Bantuan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, sehingga seluruh siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, akses pendidikan dapat menjadi lebih merata sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.